

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini peneliti memberikan kesimpulan. Kesimpulan ini terkait mengenai kajian tentang Implementasi Program Sertifikat Tanah Massal Proyek Nasional Agraria (PRONA) di desa Sananrejo Kecamatan Turen.

1. Implementasi PRONA di Desa Sananrejo Kecamatan Turen terdiri dari tahap implementasi yang terdiri dari:

- a. pemilihan lokasi
- b. biaya
- c. sosialisasi
- d. kepanitiaan
- e. penetapan peserta
- f. teknik implementasi
 - (1) pengukuran dan pemetaan
 - (2) pengumpulan data yuridis
 - (3) pemeriksaan tanah
 - (4) pengumuman
- g. partisipasi masyarakat

Pelaksanaan PRONA di desa Sananrejo dapat dikatakan berhasil dan memenuhi target. Hal ini dibuktikan dengan penerbitan sertifikat dalam

waktu sembilan bulan dan dapat menerbitkan 315 sertifikat dan secara keseluruhan target 2500 sertifikat dapat terpenuhi. Badan Pertanahan Nasional yang memberikan kewenangan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang sebagai Badan penyelenggara proyek tersebut telah melaksanakan prosedur pelaksanaan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan PRONA. Keterlibatan perangkat desa dalam kepengurusan kepanitiaan desa untuk membantu berjalannya proyek ini menjadi nilai positif karena untuk proses pembangunan masyarakat menjadi tanggungjawab bersama

2. Permasalahan PRONA

a. Biaya PRONA

Pembiayaan PRONA berasal dari DIPA APBN yang setiap tahunnya dianggarkan untuk kegiatan ini. Permasalahan timbul ketika implementasi biaya yang dibebankan di masyarakat mengenai kepengurusan administrasi desa untuk kepengurusan berkas. Setiap peserta dibebankan secara rata biaya tersebut tanpa melihat luas tanah ataupun kepengurusan lainnya. Permasalahan berlanjut pada biaya yang dibebankan dirasa terlalu mahal untuk kelengkapan administrasi sekitar Rp. 750.000 untuk satu bidang tanah.

b. Sarana Prasarana

Permasalahan lain dari implementasi PRONA di desa Sananrejo ini terletak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang yang memiliki fasilitas minim. Misal mobil dinas yang diperuntukkan dalam kegiatan-kegiatan lapangan, sarana komputer untuk pembuatan peta

tanah dan alat mengukur tanah yaitu *theodolit*. Hal ini berakibat pada terkendalanya implementasi PRONA di keseluruhan Kabupaten Malang

3. Keberhasilan suatu implementasi tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat implementasi.

a. Adapun faktor pendukung dari implementasi program PRONA di desa Sananrejo ini adalah

- 1) murah biaya yang dibebankan masyarakat dikarenakan biaya sertifikasi tanah mendapat subsidi dari pemerintah.
- 2) sambutan baik masyarakat yang secara langsung memberikan motivasi kepada panitia serta kinerja yang baik dari panitia desa dalam melengkapi keperluan pendaftaran tanah tersebut.
- 3) Kinerja panitia baik dari panitia A bentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang ataupun panitia desa yang mensukseskan implementasi PRONA.

b. Faktor penghambat dari adanya proyek ini adalah terdiri dari:

- 1) kurangnya pemahaman mereka mengenai pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah bagi masyarakat
- 2) kurangnya pemahaman mereka tentang Proyek Nasional Agraria sebagai program sertifikat massal dengan biaya murah karena mendapat subsidi dari pemerintah serta kemudahan kepengurusan.
- 3) Pemenuhan target bidang tanah yang telah ditentukan oleh Kantor Pertanahan menjadi kendala berjalannya PRONA ini

karena setiap warga hanya berhak untuk mendaftarkan satu bidang tanah saja dengan alasan pemerataan hal ini menyulitkan petugas untuk mengukur dan memetakan tanah karena letak tanah yang tidak bergerombol.

- 4) Keterbatasan fasilitas yang tersedia misalkan mobil dinas untuk transportasi, theodolit untuk pengukuran tanah,serta sarana komputer untuk pembuatan surat tanah.

B. SARAN

Permasalahan permasalahan yang timbul dalam implementasi yang telah tertuang pada hasil analisis dan interpretasi data dalam evaluasi program sertifikat massal Proyek Nasional Agraria (PRONA) di Desa Sananrejo Kecamatan Turen, maka peneliti dapat memberikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi penyempurnaan implementasi PRONA untuk selanjutnya. Serta dapat juga menjadi pembelajaran secara tidak langsung bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Malang untuk memperbenah diri agar tujuan dari PRONA bisa tercapai. Beberapa saran yang dikemukakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Masalah biaya yang sering timbul, hendaknya pengawasan dari kantor pertanahanpun sangat dibutuhkan, misalnya dalam hal biaya yang dibebankan kepada warga terlepas dari biaya subsidi pihak Kantor Pertanahan menetapkan pegawainya untuk mengawasi keuangan. Hal ini menyangkut kasus di beberapa daerah mengenai biaya PRONA yang menjadi lahan korupsi pihak pihak tertentu agar dari segi biaya yang dibebankan tidak menjadikan masalah bagi warga.

2. Penyediaan alat sebagai penunjang teknis dalam implementasi PRONA sangatlah dibutuhkan misalkan penambahan alat theodolite serta total station untuk mengukur dan memetakan tanah. Penyediaan alat harus ditambah dengan teknologi yang lebih memadai untuk kelancaran teknis pengolahan data.
3. Penyuluhan dari Kantor Pertanahan mengenai pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah sangat dibutuhkan mengingat masyarakat kurang begitu memahami pentingnya sertifikat tanah tersebut
4. Selain penyuluhan mengenai pentingnya sertifikat tanah hendaknya Kantor Pertanahan membentuk panitia penyuluhan program untuk mensosialisasikan program sertifikat tanah lainnya. Misalnya program LARASITA (Layanan Masyarakat Sertifikat Tanah) untuk pelayanan sertifikat tanah jemput bola, UMK (Usaha Menengah Kecil) yaitu mensertifikatkan tanah untuk usaha kelompok menengah kecil, MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) pensertifikatan tanah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, NELAYAN untuk sertifikat tanah bagi masyarakat nelayan dan lain lain.
5. Kantor Pertanahan Nasional hendaknya memberikan evaluasi dampak terhadap segala jenis pelayanan yang telah dilakukan untuk mengukur keberhasilan layanan agar dapat menjadi pembenahan dalam pelayanan masyarakat.

